

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Anissa, C.D. dan N. M. Machdar (2019) menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ukuran dewan direksi sebagai variabel moderating. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45 pada periode 2010-2016. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran dewan direksi mampu memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan ukuran dewan direksi bukan variabel *moderating* pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Azhari, F. (2019) menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 96 perusahaan manufaktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi logistik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Opini audit tidak mampu memperkuat pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Noviani, K., G. A. Yuniarta dan M. A. Wahyuni (2017) menguji pengaruh tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*,

pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, dan pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) 16.0 for Windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan, sedangkan komposisi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan.

Minanari (2015) menguji pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Metode yang digunakan adalah penelitian kausal, yang menggambarkan pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dan *leverage* terhadap variabel dependen dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah objek dari penelitian ini meliputi perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan dan ukuran kelembagaan pengaruh yang signifikan dan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Tapi secara kolektif semua variabel independen kepemilikan institusional, ukuran dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Trisnawati, R. (2014) menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Populasi adalah industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2011. Sampel adalah 12 perusahaan yang dikumpulkan dengan metode *purposive sampling*. Analisis konten dan analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan

kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi secara signifikan pengungkapan tata kelola perusahaan (p value = 0,001). Variabel independen lainnya seperti: profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Para peneliti di masa depan harus menambahkan variabel lain yang berpengaruh pada pengungkapan CSR. Mereka adalah jenis industri, IOS, kualitas auditor, dll.

Sha T. L. (2014) menguji pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan *Leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2009- 2011,. Alat analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel dalam penelitian ini adalah uji F (anova) untuk uji simultan dari persamaan regresi berganda dan uji t untuk uji parsial masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Disamping itu untuk melihat seberapa besar kontribusi masing-masing variabel digunakan Adjusted R square. Keseluruhan analisis ini menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari uji anova atau F test, menunjukkan ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan *Leverage* secara simultan pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan *Leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2009-2011, serta memperoleh jawaban atas kesenjangan beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan *Leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan manufaktur selama periode 2009-2011. Alat analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel dalam penelitian ini adalah uji F (anova) untuk uji simultan dari persamaan regresi berganda dan uji t untuk uji parsial masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Disamping itu untuk melihat seberapa besar kontribusi masing-masing variabel digunakan Adjusted R square. Keseluruhan analisis ini menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari uji anova atau F test, menunjukkan ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan *Leverage* secara simultan.

Erwanti, Y. dan Haryanto (2017) menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan Komisaris, Komite audit dan kualitas audit terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban. dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran variabel perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2013-2015. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Ukuran dewan komisaris (DKOM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CSR pada Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2013-2015. Variabel ukuran komite audit (UKAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Variabel kualitas audit (KUAD) memiliki efek negatif pada CSR pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2013-2015.

Nawaiseh, M. E., Soliman S., Also B., Rezk A. Z. dan Youssef, E. (2015) menguji pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dimensi karyawan di bank-bank Yordania. Analisis ini didasarkan pada konten yang diungkapkan dalam laporan tahunan mereka. Desain metodologi pendekatan. menjelaskan dari sudut pandang teoretis, tindakan tanggung jawab sosial, serta beberapa indikator profitabilitas. Kemudian, tinjauan empiris diperoleh dari laporan yang diterbitkan oleh sampel yang *representative* dari industri perbankan di Yordania. Upaya telah dilakukan untuk memverifikasi apakah ada beberapa korelasi antara konten CSR yang diungkapkan, dan ROA, ROE, Size. Temuan - Makalah ini menemukan bukti kuat untuk menolak kemungkinan pengaruh ROA, variabel SIZE pada (CSR) yang diadopsi oleh masing-masing bank dan konten pelaporan terungkap. Studi ini menerima kemungkinan hubungan dengan ROE. Namun, ini adalah jalur penelitian yang menjanjikan untuk analisis di masa depan, menggunakan sampel yang lebih besar dan lebih banyak masalah pelaporan CSR dalam kaitannya

dengan masyarakat, dan kapasitas Komunikasi lingkungan. Orisinalitas nilai Makalah ini membuka jalur penelitian baru dalam CSRD, Profitabilitas, dan Ukuran untuk kemungkinan hubungan antara kedua variabel, suatu hal yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya di Bank Umum Kepemilikan Publik Yordania. Menurut Lord Holme dan Richard Watt, dalam Hadi (2011 : 46) CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas. Selanjutnya menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas (Dalina, 2015).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai berikut: “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Menurut KNKG (2006 : 13), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris Utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris.

Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

1. komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Adapun pertanggungjawaban dewan komisaris menurut KNKG (2006 : 13) adalah sebagai berikut :

1. dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
2. dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota dewan komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota dewan komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
3. pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

Fungsi dari pengawasan dewan komisaris menurut (KNKG, 2006 : 14) adalah sebagai berikut :

1. dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal dewan komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
2. dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
3. dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
4. dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
5. dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
6. dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS.
7. dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang

mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Dewan komisaris merupakan wakil *shareholder* di dalam suatu entitas perseroan terbatas, dewan komisaris juga merupakan mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa sebuah perusahaan memenuhi semua kepentingan yang diharapkan pemegang saham. Secara garis besar dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi agar mencapai tujuan suatu perusahaan. Sebagaimana pendapat David & Thomas yang menyatakan bahwa dewan komisaris juga memiliki tugas memonitor untuk mengikuti perkembangan perusahaan, mengevaluasi dan mengarahkan keputusan dan tindakan manajemen, serta memberikan arahan strategi kepada manajemen. Ukuran dewan komisaris berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen perusahaan. Ukuran dewan komisaris merupakan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Subiantoro dalam Wahyuni, dkk, 2018: 4-5).

Menurut Sembiring (2005) pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitor yang dilakukan akan semakin efektif. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab mengelola perusahaan secara efektif. Fungsi dari dewan komisaris adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Ale, 2014 : 7).

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Ukuran dewan komisaris = Jumlah dewan komisaris
--

2.2.2 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015 : 196) profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Rasio profitabilitas disebut juga rasio kinerja operasi.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya (Kuswanto dan Manaf, 2015).

Menurut Van Horne dan Wachowicz dalam Heru Sutojo (2012:222) sebagai berikut: “rasio profitabilitas (*profitability ratio*) adalah rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi”. Dari rasio profitabilitas dapat diketahui bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan

Menurut Kasmir (2015 : 197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu :

1. untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. untuk emnilai posisi perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. untuk mengukur produktivitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun

laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat bekepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu di ketahui (Hery, 2016: 193).

Dari semua rasio profitabilitas, penulis hanya akan menggunakan rasio *return on equity* (ROE), karena rasio ini menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham. *return on equity* merupakan salah satu variabel yang terpenting yang dilihat investor sebelum mereka berinvestasi. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilitas yang bisa dialokasikan ke pemegang saham (Hanafi dan Halim, 2012: 177).

Pengertian *return on equity* (ROE) menurut Sartono (2012: 124) ROE yaitu: “mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang besar maka rasio ini akan besar”.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012: 84) ROE adalah sebagai berikut: “rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.”

Menurut Kasmir (2015: 204) Rumus untuk mencari *return on equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Interest and tax}}{\text{Equity}}$$

2.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pension, dan *asset management*. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Shleifer dan Vishny mengatakan bahwa *institutional shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan (Sari, dkk, 2013: 483).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena institusi memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu kepemilikan institusi yang memiliki saham perusahaan, maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh kepemilikan institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar (Ale, 2014: 6).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pension, reksadana, dan institusi lain dan investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar (Rustiarini dalam Wahyuni, dkk, (2018 : 4). Jika investor institusional mempunyai kepemilikan saham dalam jumlah besar, maka mereka mempunyai hak untuk mengawasi perilaku dan kinerja manajemen (Manik dalam Wahyuni, dkk, 2018: 4). Tentu saja pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat lebih ditekankan sehingga dapat memenuhi harapan para investor lainnya. kepemilikan institusional diukur dari jumlah pemegang saham institusional atau lembaga seperti perbankan, asuransi, dana pension, reksadana dan institusi lain (Trisna dalam Wahyuni, dkk, 2018 :4).

Ida Mafkuah (2013) Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. Kepemilikan saham institusional ini biasanya

merupakan saham yang dimiliki oleh perusahaan lain yang berada didalam maupun diluar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Kepemilikan saham institusi akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan, selanjutnya akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan, menyebabkan nilai perusahaan atau *price earning rasio* (PER) akan meningkat juga. Dengan adanya beberapa kelebihan yang dimiliki, investor institusional diduga lebih mampu untuk mencegah terjadinya manajemen laba, dibanding dengan investor individual. Investor institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba. Secara matematis kepemilikan institusional dapat dirumuskan :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\sum \text{Saham institusional}}{\sum \text{Saham beredar}}$$

2.2.4 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan (Dalina, 2015). *Corporate social responsibility* merupakan salah satu bentuk *sustainability reporting* yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja (Husnan dan Pamudji, 2013).

Pengertian CSR menurut Johnson dan Johnson, dalam Nor Hadi (2011: 46) menyatakan bahwa : “ *CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society* “. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya.

Maka dari itu, perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

2.2.4.1 Landasan Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan pengungkapan *corporate social responsibility*, yaitu :

1. Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder adalah semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Kasali Rhenald (2005) dalam Nor Hadi (2011: 105) mengungkapkan bahwa stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung resiko seperti investor, kreditor, karyawan, pemasok, dan masyarakat lokal. *Stakeholder* sekunder adalah pihak-pihak yang dipengaruhi ataupun mempengaruhi perusahaan, namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak dipengaruhi oleh *stakeholder* jenis ini. Adapun yang termasuk dalam kelompok *stakeholder* sekunder adalah media dan kelompok kepentingan lainnya seperti lembaga sosial masyarakat ataupun serikat buruh.

2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*) (O'Donovan, dalam Hadi, 2011: 87).

2.2.4.2 Prinsip Dasar *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Prastowo dan Huda (2011: 27) beberapa perusahaan bahkan menjadi terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan (3P) yang terdiri dari;

1. *Profit*

Merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. *profit* sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

2. *People*

Menyadari bahwa masyarakat merupakan *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat (Wibisono 2007: 34).

3. *Planet*

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini

biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme)

2.2.4.3 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Lako (2011: 90) manfaat CSR adalah sebagai berikut :

1. sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang.
2. memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.
3. meningkatkan akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok dan konsumen.
4. meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan.
5. menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan.
6. meningkat reputasi, *goodwill* dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

2.2.5 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Di Indonesia, pengungkapan CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pada pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menerapkan CSR dalam program kerjanya dan mengungkapkan CSR pada laporan tahunan perusahaan.

Menurut Nor Hadi (2011:48), pengungkapan *Corporate social responsibility* adalah: “Suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas”.

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang ditetapkan GRI (*Global Reporting Initiative*). Standar GRI dipilih

karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting (www.globalreporting.org).

Berdasarkan indikator kinerja GRI, yang dikutip dari (www.globalreporting.org) pengungkapan CSR terdiri dari tiga indikator kinerja yaitu indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada indikator kinerja sosial, dikategorikan lebih lanjut ke dalam tiga kategori yaitu hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Sehingga total ada enam indikator. Indikator kinerja menghasilkan perbandingan informasi mengenai kinerja organisasi 20 dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Organisasi didorong untuk mengikuti struktur ini dalam mengkompilasi laporan mereka, namun demikian format lainnya tetap dapat dipilih.

Pendekatan untuk menghitung kelengkapan pengungkapan CSR menggunakan variabel *dummy*. Variabel *dummy* digunakan apabila variabel berukuran kategori atau dikotomi dengan menyatakan satu kategori 0 (nol) atau 1 (satu) (Ghozali, 2013: 178). Semakin banyak item aktivitas CSR yang diungkapkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi indeks nya.

Hal tersebut dinyatakan dalam Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI_j) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CSRDI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

keterangan :

CSRDI_j : *Corporate social responsibility disclosure Index* perusahaan j

$\sum X_{ij}$: Jumlah *item* CSR yang diungkapkan oleh perusahaan

Dummy variable: 1 = jika *item* I diungkapkan; 0 = jika *item* I tidak diungkapkan, dengan demikian, $0 < \text{CSRDI}_j$

n_j : 91 *item* indikator CSR

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Komite audit beranggotakan komisaris independen dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari serta mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (www.cicfcgi.org).

2.3.2 Hubungan Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan dapat diterima. Tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* mungkin dikarenakan anggapan bahwa aktivitas *corporate social responsibility* bukan aktivitas yang merugikan, melainkan merupakan langkah strategis jangka panjang yang akan memberikan efek positif bagi perusahaan (Nurkhin, 2009).

2.3.3 Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Menurut penelitian terdahulu oleh Laksmi dan Purwanto (2013) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer dan meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam tanggung jawab sosial, sehingga dengan semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka perusahaan cenderung untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas mengenai pelaksanaan pengungkapan *corporate social responsibility*. Maka struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

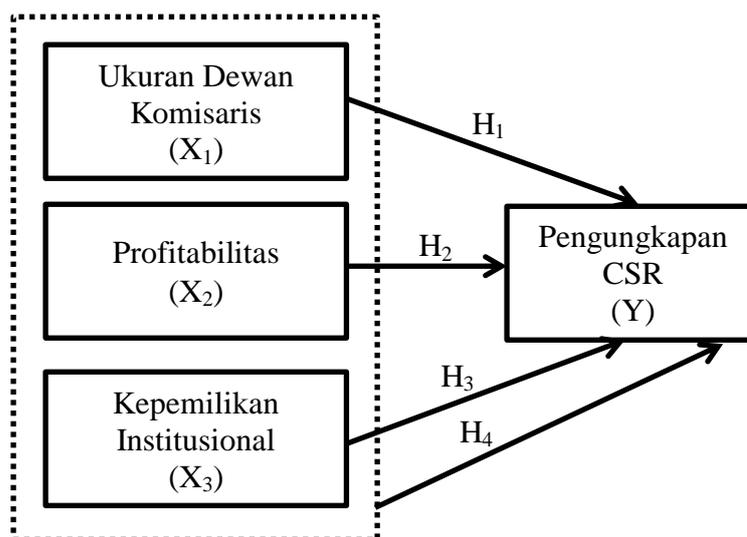
2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang didukung dengan teori-teori yang relevan, hipotesis penelitian antara lain sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan
- H₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan
- H₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada industri perbankan
- H₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama terhadap pengungkapan CSR pada industri

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini diidentifikasi bahwa faktor yang akan dibahas adalah pengaruh ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). maka kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian